

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI JAWA TIMUR: ANALISIS DAMPAK BELANJA PEMERINTAH DAERAH PADA PENDIDIKAN, KESEHATAN, DAN EKONOMI SERTA TINGKAT KEMISKINAN

Lukman Hakim¹, Dewanti Rahma Ariestingtyas², Fina Nidaul Mahalli³,
Muhammad Rizaldi⁴

¹⁾ *Faculty of Economics and Business, Universitas Syiah Kuala, Indonesia*
^{2,3,4)} *Faculty of Economics and Business, Universitas Brawijaya, Indonesia*

e-mail: lukmandja@usk.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak belanja pemerintah daerah dan tingkat kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dari tahun 2017-2021 untuk 38 Kabupaten/Kota. Metode analisis yang digunakan adalah Regresi Data Panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja pemerintah daerah dan tingkat kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap IPM di Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan hasil estimasi yang telah dilakukan, ditemukan bahwa belanja pemerintah fungsi pendidikan dan tingkat kemiskinan (PEN dan TK) memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hasil ini menunjukkan bahwa perlu dilakukan upaya yang lebih besar dan efektif dalam alokasi belanja pemerintah pada sektor pendidikan.

Kata kunci: Pengeluaran Pemerintah, Tingkat Kemiskinan, dan Indeks Pembangunan Manusia

Abstract

This study aims to analyze the impact of local government spending and poverty levels on the Human Development Index (IPM) in East Java Province. This study uses secondary data from the Central Bureau of Statistics (BPS) Directorate General of Fiscal Balance from 2017-2021 for 38 district/city. The analytical method used is a regression panel with Regression Data Panel. The results of the study show that local government spending and poverty levels have a significant effect on HDI in East Java Province. Based on the estimation results that have been carried out, it was found that government spending on the function of education and the poverty rate (PEN and TK) has a significant negative effect on the Human Development Index (IPM). These results indicate that greater and more effective efforts are needed in allocating government spending in the education sector.

Keywords: *Government Expenditures, Poverty Level, and Human Development Index*

PENDAHULUAN

Pembangunan manusia merupakan salah satu tujuan utama dari setiap negara dalam mencapai kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator yang digunakan untuk

mengukur kemajuan pembangunan manusia di suatu negara, yang mencakup tiga dimensi utama, yaitu pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Ketiga dimensi ini saling terkait dan saling mempengaruhi dalam membentuk IPM suatu negara. Belanja pendidikan, kesehatan, dan

ekonomi merupakan faktor penting yang berperan dalam meningkatkan IPM suatu negara.

Data yang berasal dari Badan Pusat Statistik (2023) menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Meskipun demikian, terdapat disparitas yang signifikan dalam IPM antar provinsi. Pada tahun 2023, DKI Jakarta menduduki peringkat tertinggi dengan IPM mencapai 83,55, sementara provinsi Papua menjadi provinsi dengan IPM terendah, yakni 63,01. Ketidaksetaraan IPM juga tampak di antara kabupaten/kota di Provinsi Timur pada tahun yang sama. Kota Malang memimpin dengan IPM tertinggi sebesar 84,00, sedangkan Kabupaten Sampang mencatat IPM terendah dengan angka 66,19. Data ini mencerminkan ketidakseimbangan pembangunan di berbagai wilayah.

Terdapat beberapa permasalahan terkait IPM di Jawa Timur, seperti rendahnya umur harapan hidup, tingginya angka kemiskinan. Provinsi di Indonesia dengan jumlah penduduk miskin paling banyak adalah Jawa Timur. Jawa Timur merupakan provinsi yang terletak di ujung timur Pulau Jawa dan memiliki jumlah penduduk terbesar kedua setelah Jawa Barat. Persentase kemiskinan di Jawa Timur selalu mengalami penurunan dalam periode tahun 2016-2019. Meskipun demikian, pada tahun 2020 hingga tahun 2021, terjadi peningkatan persentase kemiskinan dari 10,37% pada tahun 2019 menjadi 11,40% pada tahun 2021. Dengan demikian, pada tahun 2021, jumlah penduduk miskin mencapai 4.572.730 orang, atau setara dengan 16,6% dari total penduduk miskin di seluruh Indonesia (Mauludi & Nur Rahmawati, 2023). Selain itu berdasar data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), umur harapan hidup (UHH) di Jawa Timur pada tahun 2023 mencapai 72,11, yang menunjukkan angka yang lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional. Umumnya, UHH Indonesia pada tahun yang sama mencapai 73,93. Dengan perbedaan ini, terlihat bahwa

Jawa Timur menghadapi tantangan khusus dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakatnya.

Data dari Direktorat Jenderal Perimbangan (DJPK) yang menyebutkan bahwa belanja kesehatan pemerintah di Jawa Timur pada tahun 2022 mencapai Rp 6,4 triliun, meningkat 44% dibandingkan tahun sebelumnya, menunjukkan bahwa pemerintah di Jawa Timur memberikan perhatian yang lebih besar terhadap sektor kesehatan pada tahun tersebut. Peningkatan anggaran untuk sektor kesehatan dapat membantu meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan di Jawa Timur, peningkatan belanja kesehatan pemerintah di Jawa Timur pada tahun 2020 dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan belanja pendidikan pemerintah di Jawa Timur pada tahun 2022 sebesar 8,6 triliun, menurun 37% dibandingkan tahun sebelumnya. Anggaran pendidikan yang berkurang dapat berdampak pada berbagai aspek, termasuk ketersediaan sarana dan prasarana, kualitas pendidikan, serta akses masyarakat terhadap layanan pendidikan yang memadai. Selain itu, terdapat belanja fungsi ekonomi di Jawa Timur pada tahun 2022 sebesar 1,5 triliun, menurun 13% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan signifikan ini menimbulkan pertanyaan terkait dengan alokasi dan efisiensi penggunaan anggaran dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengindikasikan bahwa belanja pendidikan dan kesehatan memiliki dampak terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Fajar & Indrawati, 2020; Purnomoratih, 2023). Temuan tersebut memberikan wawasan tentang pentingnya alokasi dana pada sektor-sektor tersebut untuk meningkatkan IPM. Selain itu, penelitian lain yang menggunakan variabel belanja modal menunjukkan bahwa belanja modal dan tingkat kemiskinan

mempengaruhi IPM di Sulawesi Utara dan di Kota Manado (Tarumingkeng et al., 2018; Tumbuan et al., 2023). Hasil ini menggambarkan kompleksitas faktor-faktor yang dapat memengaruhi perkembangan manusia, termasuk aspek-aspek ekonomi dan kemiskinan di suatu daerah. Dengan demikian, pemahaman mendalam terhadap berbagai jenis belanja dapat memberikan pandangan holistik terhadap faktor-faktor yang membentuk Indeks Pembangunan Manusia.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, sebagian besar penelitian membahas tentang pengeluaran pemerintah dari perspektif belanja fungsi pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan karena berusaha untuk menganalisis lebih dalam terkait pengeluaran pemerintah fungsi ekonomi. Selain itu, dalam penelitian ini menggunakan studi kasus di Tingkat Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. Dalam penelitian ini, akan membahas secara detail tentang pengaruh belanja pendidikan, kesehatan, dan ekonomi terhadap IPM. Penelitian ini juga menyajikan wawasan mengenai belanja fungsi yang paling berpengaruh terhadap IPM, tinjauan literatur dan data statistik terkini mengenai belanja pendidikan, kesehatan, dan ekonomi di berbagai negara di seluruh dunia, serta dampaknya terhadap IPM. Dalam artikel ini, kami bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya belanja pendidikan, kesehatan, dan ekonomi dalam meningkatkan IPM, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan IPM.

TINJAUAN PUSTAKA

Belanja Daerah

Menurut UU No. 1 Tahun 2022, Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah merupakan pengeluaran yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah guna membiayai berbagai kegiatan dan program yang terkait dengan tugas dan

tanggung jawab pemerintahan di daerah tersebut. Harapannya adalah setiap daerah mampu memanfaatkan anggaran belanja daerah dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi khusus di daerah masing-masing (Fatimah N N, 2020).

Belanja Daerah sendiri dapat diklasifikasikan menurut fungsi, yaitu klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi-fungsi tersebut dikelompokkan ke dalam 11 fungsi Pelayanan Umum, Pertahanan, Ketertiban dan Keamanan, Ekonomi, Perlindungan Lingkungan Hidup, Perumahan dan Permukiman, Kesehatan, Pariwisata dan Budaya, Agama, Pendidikan, dan Perlindungan sosial.

Belanja fungsi ekonomi, belanja fungsi pendidikan, dan belanja fungsi kesehatan merujuk pada jenis pengeluaran pemerintah yang diatur dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia. Belanja fungsi ekonomi mengacu pada pengeluaran pemerintah yang ditujukan untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi, seperti belanja infrastruktur dan investasi dalam sektor ekonomi tertentu. Belanja fungsi pendidikan mengacu pada pengeluaran pemerintah untuk membiayai sektor pendidikan, seperti pembangunan gedung sekolah, pembayaran gaji guru, dan subsidi pendidikan. Sementara itu, belanja fungsi kesehatan merujuk pada pengeluaran pemerintah yang ditujukan untuk membiayai sektor kesehatan, seperti pembangunan rumah sakit, pembayaran gaji tenaga medis, dan subsidi kesehatan. Pengertian tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020.

Kemiskinan

Masalah kemiskinan merupakan persoalan yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Menurut Nurkse, ada tiga jenis kemiskinan, yakni kemiskinan absolut, kemiskinan relatif,

dan kemiskinan kultural (Arifin, 2017). Kemiskinan absolut terjadi ketika seseorang memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya yang dasar. Kemiskinan relatif terjadi ketika seseorang mampu memenuhi kebutuhan dasar, namun masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan masyarakat sekitarnya. Sedangkan kemiskinan kultural terjadi ketika seseorang atau masyarakat tidak mau memperbaiki kondisinya.

Teori lingkaran setan kemiskinan Nurkse menyatakan bahwa kemiskinan suatu wilayah berpusat pada rendahnya tingkat produktivitas yang mengakibatkan rendahnya tingkat upah (Sari, 2018). Dengan pendapatan yang rendah, masyarakat akan sulit menabung karena sebagian besar pendapatannya habis untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini dapat mengakibatkan rendahnya modal yang terbentuk (investasi) yang pada gilirannya akan menyebabkan kurangnya modal. Kurangnya modal akan mengakibatkan tingkat produktivitas yang rendah dan seterusnya, membentuk lingkaran setan kemiskinan.

Bellinger (2007) dalam Manik (2015) menjelaskan bahwa kemiskinan terdiri dari dua dimensi, yaitu pendapatan dan non-pendapatan. Dimensi pendapatan merujuk pada keadaan di mana sebuah rumah tangga memiliki pendapatan yang rendah, sedangkan dimensi non-pendapatan mencakup ketidakmampuan dan kekurangan harapan. Todaro & Smith (2006) menjelaskan bahwa kemiskinan absolut merujuk pada kondisi di mana sejumlah penduduk tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, sehingga mereka hidup di bawah tingkat pendapatan riil minimum atau di bawah garis kemiskinan internasional.

Indeks Pembangunan Manusia

Menurut Heka (2017), pada tahun 1990, UNDP menggunakan indikator IPM untuk pertama kalinya. IPM dijelaskan oleh UNDP sebagai proses untuk memperluas pilihan-pilihan yang tersedia bagi penduduk terkait dengan

pendapatan, kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan lain sebagainya. Pembangunan manusia yang menyeluruh harus menjadi fokus utama setiap daerah dalam proses pembangunan, dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara fisik, mental, dan spiritual. Penghitungan IPM memiliki manfaat sebagai parameter keberhasilan dalam membangun kualitas hidup masyarakat, serta dapat meningkatkan level kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan manusia yang tepat dan baik (Hatta & Khoirudin, 2020).

IPM juga dapat digunakan untuk menentukan peringkat suatu daerah/negara dibandingkan dengan daerah atau negara lain. Selain itu, IPM menjadi parameter kinerja pemerintahan karena peran pemerintah sebagai faktor fasilitator dan katalisator dalam proses pembangunan. Nilai IPM yang tinggi mencerminkan peningkatan tingkat kesejahteraan penduduk (Ariza, 2016).

Tipe Artikel

Artikel merupakan artikel asli hasil penelitian atau hasil review dari artikel-artikel terdahulu. Artikel dapat ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Jumlah halaman artikel antara 10 – 12 halaman termasuk daftar pustaka.

Sistematika penulisan artikel hasil penelitian terdiri dari judul, nama penulis, institusi dan alamat korespondensi, abstrak, kata kunci, *abstract*, *keywords*, pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, simpulan dan saran, ucapan terimakasih dan daftar pustaka.

Sistematika penulisan artikel konseptual (berisi hasil *review*) terdiri dari judul, nama penulis, institusi dan alamat korespondensi, abstrak, kata kunci, *abstract*, *keywords*, pendahuluan, bagian inti, ringkasan dan daftar pustaka.

Judul artikel ditulis menggunakan huruf arial ukuran 14, *capitalized*, *bold*, *centered*, terdiri dari maksimum 15 kata dan menggambarkan isi naskah.

Nama penulis ditulis menggunakan huruf arial ukuran 12 tidak disertai gelar, nama depan disingkat sedangkan nama belakang (nama keluarga) tidak disingkat.

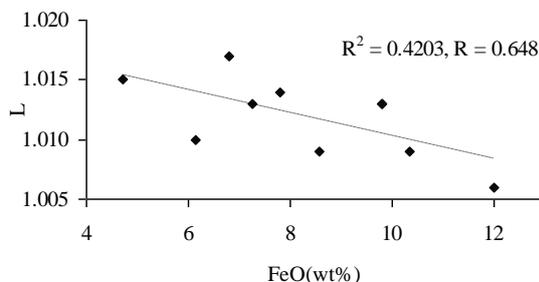
Nama penulis yang berasal dari instansi berbeda ditandai menggunakan superscript di belakang nama.

Naskah dipaparkan secara naratif (tanpa penomoran di depan sub judul) dan pemaparan dalam bentuk sub judul dihindari.

Rumus dituliskan tersendiri tidak di dalam kalimat dan dilengkapi dengan penomoran di sebelah kanan. Rumus ditulis menggunakan microsoft equation.

$$x + y = 2 \quad (1)$$

Gambar disisipkan di dalam *text box* dan *figures caption* (keterangan gambar) diletakkan di bawah gambar. Keterangan gambar diberi nomor dan gambar harus dirujuk di dalam teks. Keterangan gambar diawali dengan huruf besar. Keterangan gambar yang lebih dari satu baris ditulis menggunakan spasi 1. Gambar dilukis dengan lebar garis 1 pt dan seharusnya memiliki kualitas kekontrasan yang baik.



Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

Tabel 1. Variabel Penelitian

No.	Variabel	Pengukuran
1.	IPEI	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif oleh BAPPENAS
2.	EKO	Persentase Kenaikan Belanja Fungsi Ekonomi
3.	KES	Persentase Kenaikan Belanja Fungsi Kesehatan
4.	PEN	Persentase Kenaikan Belanja Fungsi Pendidikan
5.	TK	Persentase Kemiskinan

Sumber: Penulis, 2023

Metode Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel. Regresi data panel menggabungkan data

$$IPM_{it} = \alpha + \beta_1 EKO_{it} + \beta_2 KES_{it} + \beta_3 PEN_{it} + \beta_4 TK_{it} + \epsilon_{it}$$

dimana:

Gambar 1. Plots of lineation (L) and FeO content showing negative correlation

METODE

Data dan Metode Pengumpulan Data

Untuk penelitian ini, digunakan data sekunder yang berasal dari sumber yang berbeda. Data belanja berfungsi untuk 38 kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2017-2021 dikumpulkan dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Selain itu, BPS juga menyediakan data untuk tingkat kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Populasi

Keseluruhan nilai yang dapat ditentukan dengan ukuran kuantitatif maupun kualitatif yang menggunakan ciri khusus dalam sekumpulan objek disebut sebagai populasi. Populasi adalah sekelompok komponen yang berfungsi sebagai unit analisis dalam penelitian. Populasi yang ditentukan dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota yang ada pada Provinsi Jawa Timur.

IPM : Variabel terikat (dependen) yaitu indeks pembangunan manusia
 EKO : Variabel bebas (independen) Belanja fungsi Ekonomi
 KES : Variabel bebas (independen) Belanja fungsi kesehatan
 PEN : Variabel bebas (independen) Belanja fungsi Pendidikan
 TK : Variabel bebas (independen) Tingkat Kemiskinan
 t : Periode t
 i : Entitas ke-i

Terdapat tiga metode (model), sesuai dengan (Widarjono, 2007) untuk pendugaan parameter model dengan menggunakan data panel. Model CEM, FEM, dan Rem adalah ketiga metode tersebut. Uji Hausman, Uji Chow, dan Uji

Lagrange-Multiplier kemudian sebagai alat untuk membandingkan ketiga model untuk menentukan model yang terbaik. Uji asumsi klasik dilakukan setelah model terbaik ditemukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Berdasarkan data mengungkapkan bahwa rata-rata kenaikan belanja fungsi ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur dari tahun 2017 hingga 2021 sebesar 32%, kemudian rata-rata

kenaikan belanja fungsi kesehatan adalah sebesar 10%, kemudian yang paling rendah adalah rata-rata dari kenaikan belanja fungsi pendidikan yaitu sebesar 6%. Selain itu, dilihat dari tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur sebesar 11%.

Tabel 2. Deskriptif Statistik Variabel Penelitian

Variabel	N	Mean	Std. Dev	Min	Max
EKO	190	32.88149	150.5163	-92.15634	1636.026
KES	190	10.29017	16.95678	-52.15005	81.91575
PEN	190	6.894692	120.3114	-49.0406	1649.42
TK	190	11.02626	4.527543	3.81	23.76
IPM_	190	71.32437	5.179444	59.9	82.31

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2023

Analisis Data

Dalam tabel berikut, terdapat perbandingan hasil analisis regresi dari tiga model, yaitu *Common Effect Model*,

Random Effect Model, dan *Fixed Effect Model*. Dari ketiga model tersebut, *Fixed Effect Model* dianggap sebagai model terbaik.

Tabel 3. Perbandingan Hasil *Common Effect Model*, *Fixed Effect Model*, dan *Random Effect Model*

Variabel	Common Effect Model	Fixed Effect Model (Model Terbaik)	Random Effect Model
EKO	0.0012704 (0.403)	0.001595** (0.009)	0.0016957*** (0.000)
KES	0.0169254 (0.231)	0.008473** (0.006)	0.0074583** (0.031)
PEN	-0.0000379 (0.984)	-0.0008982*** (0.000)	-0.0008979* (0.071)
TK	-0.9081472*** (0.000)	-0.3837587*** (0.000)	-0.06073285*** (0.000)
Cons	81.12216*** (0.000)	75.42232*** (0.000)	77.89462*** (0.000)
Observations	190	190	190
F statistics	86.36	12.52	94.60
Probability>F	0.0000	0.0000	0.0000

Variabel	Common Effect Model	Fixed Effect Model (Model Terbaik)	Random Effect Model
stat			
R-Squared	0.6512	0.6440	0.6487
Number of Regency	38	38	38

*signifikan pada taraf 10%, ** signifikan pada taraf 5%, *** signifikan pada taraf 1%
Sumber: Diolah oleh Penulis, 2023

Nilai probability variabel belanja fungsi ekonomi, kesehatan, dan pendidikan serta tingkat kemiskinan di bawah 0,05, artinya variabel independen tersebut berpengaruh terhadap variabel pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sesuai dengan temuan estimasi Model Fixed Effect. Koefisien determinasi juga sebesar 0,6440. Hal ini menunjukkan bahwa variabel belanja

fungsi ekonomi, kesehatan, dan pendidikan serta tingkat kemiskinan sebesar 64,40% dapat menjelaskan indeks pembangunan manusia di kabupaten dan kota Provinsi Jawa Timur, dengan komponen sisanya berasal dari variabel lain di luar model. Kemudian dapat diperoleh berdasarkan hasil estimasi :

$$IPM_{it} = 75.42232 + 0.001595EKO_{it} + 0.008473KES_{it} - 0.0008982PEN_{it} - 0.3837587TK_{it} + \epsilon_{it}$$

Berdasarkan persamaan regresi diatas maka:

1. Nilai constanta sebesar 75.42232 menunjukkan bahwa apabila variable kenaikan belanja fungsi ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan tingkat kemiskinan bernilai nol maka indeks pembangunan manusia akan bernilai 75.42232
2. Nilai koefisien kenaikan belanja fungsi kesehatan sebesar 0.001595maka apabila nilai kenaikan belanja fungsi ekonomi mengalami kenaikan sebesar 1 satuan maka variabel Indeks Pembangunan Manusia akan meningkat sebesar 0.001595
3. Nilai koefisien kenaikan belanja fungsi kesehatan sebesar 0.008473 maka

4. Nilai koefisien kenaikan belanja fungsi pendidikan sebesar -0.0008982maka apabila nilai kenaikan belanja fungsi pendidikan mengalami kenaikan sebesar 1 satuan maka variabel Indeks Pembangunan Manusia akan menurun sebesar -0.0008982
5. Nilai koefisien tingkat kemiskinan - 0.3837587maka apabila nilai tingkat kemiskinan mengalami kenaikan sebesar 1 satuan maka variabel Indeks Pembangunan Manusia akan menurun sebesar -0.3837587

Pengaruh Belanja Pemerintah Fungsi Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan hasil estimasi tersebut, Dalam penelitian ini, kita ingin melihat pengaruh belanja pemerintah fungsi ekonomi (EKO) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Timur. Variabel EKO memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap IPM (koefisien 0,001595 dengan nilai $p=0,009$). Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa belanja pemerintah

fungsi ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Timur.

Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian oleh Purnomoratih (2023) yang memberikan hasil bahwa belanja fungsi ekonomi berpengaruh terhadap IPM. Belanja fungsi ekonomi, seperti investasi infrastruktur dan pembangunan ekonomi, dapat berpengaruh positif terhadap peningkatan IPM. Hal ini dikarenakan belanja ekonomi dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan

produktivitas dan daya saing ekonomi, serta memberikan akses lebih baik terhadap sumber daya dan infrastruktur yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, belanja ekonomi juga dapat mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial, karena meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan publik dan peluang ekonomi. Studi terdahulu telah menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara belanja ekonomi dan IPM di berbagai negara di seluruh dunia. Namun, penting juga untuk memperhatikan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi IPM, seperti faktor demografis, sosial, dan lingkungan, dalam merancang kebijakan untuk meningkatkan IPM suatu negara (Todaro, 2013).

Pengaruh Belanja Pemerintah Fungsi Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan hasil estimasi tersebut, variabel yang diamati adalah pengaruh Belanja Pemerintah Fungsi Kesehatan (KES) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Timur menggunakan tiga model, yaitu Common Effect Model, Fixed Effect Model, dan Random Effect Model. Dari hasil analisis, didapatkan bahwa variabel KES memiliki pengaruh positif terhadap IPM pada ketiga model. Model Fixed Effect dianggap sebagai model terbaik karena memiliki nilai koefisien yang signifikan pada taraf kepercayaan 99%, dibandingkan dengan model lainnya. Nilai koefisien pada model Fixed Effect adalah 0.008473, yang menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1 unit Belanja Pemerintah Fungsi Ekonomi akan memberikan kontribusi positif sebesar 0.008473 terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia.

Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Palayukan (2019) yang menunjukkan bahwa belanja pemerintah bidang kesehatan memberikan Pengaruh yang positif dan signifikan dalam menentukan besarnya perubahan indeks pembangunan manusia. Selain itu juga terdapat penelitian oleh Ranadhani (2021)

yang menunjukkan bahwa Belanja Pemerintah Bidang Kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Sulawesi Utara. Belanja fungsi kesehatan diharapkan dapat memperbaiki kondisi kesehatan masyarakat, memperpanjang harapan hidup, dan meningkatkan produktivitas. Semua faktor ini dapat berdampak positif pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) suatu negara. Selain itu, belanja kesehatan juga dapat memperkuat sistem kesehatan suatu negara, meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, dan mengurangi kesenjangan kesehatan antar wilayah atau antar kelompok masyarakat (Kruk, 2021). Hasil penelitian lain juga memberikan hasil bahwa belanja fungsi kesehatan tidak berpengaruh terhadap IPM (Fajar & Indrawati, 2020).

Pengaruh Belanja Pemerintah Fungsi Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan hasil estimasi tersebut, menunjukkan bahwa variabel PEN (Belanja Pemerintah Fungsi Pendidikan) memiliki pengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Terdapat pengaruh yang signifikan secara statistik pada level signifikansi 1% antara variabel PEN dan IPM. Setiap peningkatan satu unit pada variabel Pen akan menurunkan nilai IPM sebesar - 0.0008982. Hasil ini menunjukkan bahwa Belanja Pemerintah Fungsi Pendidikan memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap IPM.

Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Purnomoratih (2023) yang menunjukkan Belanja Pendidikan berpengaruh negatif terhadap IPM. Selain itu penelitian oleh Marlin (2022) menunjukkan bahwa ada pengaruh kuat belanja Fungsi Pendidikan dan belanja Fungsi Perumahan terhadap Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi salah satu indikator ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi kemajuan suatu negara dalam aspek-aspek seperti harapan hidup, pendidikan, dan

pendapatan. Pendidikan biasanya dianggap sebagai faktor penting dalam meningkatkan IPM karena pendidikan dapat membantu meningkatkan kemampuan dan keterampilan individu serta meningkatkan akses ke kesempatan kerja yang lebih baik.

Namun, terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan pendidikan berpengaruh negatif terhadap IPM, di antaranya meliputi tingginya biaya pendidikan yang dapat membuat banyak orang tidak mampu untuk mendapatkan pendidikan yang layak, sehingga walau belanja pendidikan terus meningkat, masyarakat tidak memiliki kesempatan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan mereka. Hal ini dapat mengurangi IPM secara keseluruhan. Selain itu, kualitas pendidikan yang buruk atau tidak memadai dapat membatasi kemampuan seseorang untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk sukses dalam kehidupan. Hal ini dapat mengurangi IPM karena pendidikan yang buruk tidak memberikan kontribusi yang cukup dalam meningkatkan kemampuan dan keterampilan individu. Serta, ketidaksetaraan dalam akses pendidikan dapat mengurangi kesempatan orang-orang dari kelompok yang kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Hal ini dapat menyebabkan kesenjangan dalam kemampuan dan keterampilan antara individu-individu dari kelompok yang berbeda, dan dapat mengurangi IPM secara keseluruhan. Lebih lanjut, kurangnya kesempatan kerja, meskipun pendidikan dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan individu, kurangnya kesempatan kerja yang sesuai dengan kemampuan dan keterampilan tersebut dapat mengurangi manfaat dari pendidikan. Hal ini dapat mengurangi IPM karena individu-individu yang terdidik mungkin tidak memiliki kesempatan untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan mereka. Selain itu, belanja daerah, khususnya belanja yang bersifat wajib untuk pendidikan dengan porsi terbesar, belum mencapai tingkat kualitas yang memadai.

Pengaruh Tingkat Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Hasil estimasi menunjukkan bahwa variabel Tingkat Kemiskinan (TK) memiliki pengaruh negatif yang sangat signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jawa Timur. Lebih rinci, hasil tersebut mengindikasikan bahwa setiap peningkatan satu unit pada variabel TK akan menyebabkan penurunan nilai IPM sebesar -0.3837587 . Selain itu, nilai signifikansi sebesar 0.000 menunjukkan bahwa pengaruh tersebut bersifat sangat signifikan secara statistik.

Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Ningrum (2020) menunjukkan bahwa secara parsial variabel kemiskinan dan tingkat pengangguran berpengaruh signifikan terhadap IPM. Penelitian lain juga memberikan hasil bahwa kemiskinan berpengaruh terhadap IPM di Sulawesi Utara (Tarumingkeng et al., 2018). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan sangat penting untuk diperhatikan dalam upaya meningkatkan IPM di Jawa Timur. Selain itu, estimasi juga menunjukkan adanya pengaruh negatif yang signifikan secara statistik pada level signifikansi 1% antara variabel TK dan IPM. Dalam rangka meningkatkan IPM, hasil estimasi ini menunjukkan bahwa perlu dilakukan upaya-upaya untuk menekan tingkat kemiskinan yang diselenggarakan oleh pemerintah, serta memperhatikan alokasi belanja pemerintah yang lebih efektif dan efisien pada tingkat kemiskinan. Hal ini diharapkan dapat memberikan dampak yang lebih positif pada peningkatan IPM secara keseluruhan.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil estimasi yang telah dilakukan, ditemukan bahwa kenaikan belanja pemerintah fungsi ekonomi dan kesehatan akan meningkatkan IPM, sedangkan kenaikan belanja pemerintah fungsi pendidikan dan tingkat kemiskinan akan menurunkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hasil ini menunjukkan bahwa perlu dilakukan upaya yang optimal dan efektif

dalam alokasi belanja pemerintah pada sektor pendidikan. Saran yang dapat diberikan adalah pemerintah perlu evaluasi terhadap alokasi belanja pemerintah pada sektor pendidikan, sehingga dapat ditemukan cara yang lebih efektif dalam penggunaan anggaran. Selain itu, pemerintah juga harus meningkatkan angka partisipasi sekolah sehingga dapat memberikan dampak yang lebih besar pada peningkatan IPM. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas tenaga pendidik, pengembangan kurikulum, serta memberikan kesempatan pendidikan yang lebih merata bagi masyarakat.

Dari sisi tingkat kemiskinan, perlu adanya program pengentasan kemiskinan dan pengendalian kemiskinan, hal ini karena tingkat kemiskinan juga sangat berpengaruh terhadap rendahnya IPM. Oleh karena itu, saran yang diberikan adalah memberikan pelatihan dan bantuan modal kepada masyarakat miskin agar mereka dapat memulai usaha atau meningkatkan usaha yang telah ada, meningkatkan akses dan kualitas infrastruktur di daerah-daerah yang terpinggirkan dan miskin, memberikan jaminan sosial dan perlindungan bagi masyarakat miskin.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Z. 2017. *Analisis Pengaruh Kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia, Dan Angkatan Kerja Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Di Sulawesi Selatan Tahun 2010-2014*. University of Muhammadiyah Malang.
- Ariza, A. (2016). Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan belanja modal terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) dalam perspektif Islam. *Al-Maslahah Jurnal Ilmu Syariah*, 12(1), 1–21. doi: 10.24260/almaslahah.v12i1.348.
- Fajar, M. A., & Indrawati, L. (2020). Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan Dan Belanja Perumahan Dan Fasilitas Umum Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur). *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(1), 108–118.
- Harjunadhi, J. T., & Rahmawati, F. (2020). Pengaruh belanja pendidikan, belanja kesehatan, dan ump terhadap ipm di indonesia tahun 2014 –2018. *Inovasi*, 16(2), 241-249.
- Hatta, R., & Khoirudin, R. (2020). Analisis tingkat kemiskinan di Propinsi NTT: Pendekatan dua panel. *Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis*, 11(2), 138–150. doi: 10.33059/jseb.v11i2.2004.
- Heka, A. J. L. (2017). Pengaruh pengeluaran pemerintah bidang kesehatan dan pendidikan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Sulawesi Utara. *EFISIENSI*, 17(1), 206-217. Retrieved from: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbi/article/view/16658>.
- Indrasuara, et. al., (2019). *Analisis Faktor-Faktor yang berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia*. Jurnal Manajemen. Sulawesi Barat.
- Kruk, Margaret E, Sandro Galea, Marta Prescott & Lynn P Freedman. (2007). *Health Care Financing and Utilization of Maternal Health Services in Developing Countries*. Health Policy and Planning. (22): 303-310 doi:10.1093/heapol/czm027
- Mauludi, A. A., & Nur Rahmawati, F. (2023). Pengaruh Upah Minimum, Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, Dan Belanja Modal Terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2017 s/d 2021. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10(1).
- Manik, T. 2015. Analisis Pengaruh Kemakmuran, Ukuran Pemerintah Daerah, Inflasi, Intergovernmental Revenue Dan Kemiskinan Terhadap Pembangunan Manusia Dan Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Organisasi Dan Manajemen*, 9(2), 107–124.
- Marlin, S., Mus, A. R., & Junaid, A. (2022). Pengaruh Belanja Fungsi Pendidikan, Kesehatan, Perumahan dan Fasilitas Umum terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *Jurnal Ekonomika*, 6(2), 210-224.
- Ningrum, J. W., Khairunnisa, A. H., & Huda, N. (2020). Pengaruh kemiskinan, tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Indonesia tahun 2014-2018 dalam perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 212-222.
- Palayukan, M. (2019). Pengaruh belanja

- pemerintah terhadap indeks pembangunan manusia: Studi kasus provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal BPPK: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan*, 12(2), 74-91.
- Purnomoratih, Y. (2023). Peran Belanja Pemerintah Fungsi Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi terhadap Pembangunan SDM Kalimantan Selatan. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 106–123.
<https://doi.org/10.33105/jmp.v4i2.413>
- Ranadhani, A., Kumenaung, A. G., & Tolosang, K. D. (2021). Pengaruh Tingkat Pengangguran, Tingkat Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Pemerintah Bidang Pendidikan dan Bidang Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2008-2019. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 21(2).
- Sari, N. I. (2018). Determinan Tingkat Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 – 2014. *Economics Development Analysis Journal*, 7(2), 128–136.
<https://doi.org/10.15294/edaj.v8i2.23411>
- Suselo, S. L., & Tarsidin, T. (2009). Kemiskinan Di Indonesia: Pengaruh Pertumbuhan Dan Perubahan Struktur Ekonomi. *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, 11(2).
<https://doi.org/10.21098/bemp.v11i2.239>.
- Todaro, M. ., & Smith, S. S. (2006). *Pembangunan Ekonomi, (9th ed)*. Jakarta: Erlangga.
- Todaro, Michael, P. dan Smith, Stephen C. (2013). "*Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*", Edisi Kedelapan, Jakarta: Erlangga, 2013
- Tarumingkeng, W. A., Rumat, V. A., & Rotinsulu, T. O. (2018). Pengaruh Belanja Modal dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 19(2).
- Tumbuan, C. C. G., Rorong, I. P. F., & Tumangkeng, S. Y. L. (2023). Pengaruh Belanja Modal, Pendidikan, dan Pengangguran Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 23(2), 121–132.
- Widarjono, A. (2007). *Ekonometrika Teori dan Aplikasi untuk Ekonomi dan Bisnis*. Edisi Kedua. Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta.
- Zakariya, A. (2016). Analisis Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Pembangunan Dan Kemiskinan Kabupaten/Kota Di Jawa Timur. *Riset Pembangunan*, 12(2).